2019

PERBUP NO.35, BD.2019/NO.35, 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK: • bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah

Desa, dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,

Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

 Menerangkan tentang pedoman bantuan keuangan, pengelolaan bantuan keuangan, sisa dana bantuan keuangan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan, sanksi administratif dan ketentuan peralihan;

CATATAN: • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 10 September 2019;

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 30
Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.